

## KONFLIK PADA KASUS RELOKASI PASAR INPRES DI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR

**Fatmah Wahyuni Tamher**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

Email : fatmah.tamher@gmail.com

### **Abstrak**

*Relokasi terhadap Pasar Inpres di Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor telah melahirkan konflik antara Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan pedagang pasar dan masyarakat yang belum terselesaikan hingga kini. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisa dinamika konflik pada kasus relokasi Pasar Inpres di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen yang digunakan, yaitu penelitian lapangan yang ditempuh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses relokasi dilakukan oleh Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan cara-cara yang tidak demokratis, represif dan mendudukkan diri sebagai superordinat, pemilik otoritas penuh dan sumber kebenaran mutlak. Adapun pihak-pihak yang berkonflik adalah pihak Pemkab. Biak Numfor dengan pedagang pasar yang didukung oleh masyarakat dalam menolak relokasi. Terdapat pula pelaku usaha bermodal besar yang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari relokasi tersebut. Konflik tersebut telah menyebabkan terjadinya Krisis I yang ditandai dengan pembongkaran paksa dan pembakaran tempat jualan pedagang, serta Krisis II yang ditandai dengan peristiwa kebakaran yang meluluhlantakkan Pasar Inpres Biak. Meski terus menghadapi tekanan dan berbagai peristiwa yang menghancurkan tempat jualannya, sebagian besar pedagang tetap bertahan berjualan di Pasar Inpres Biak. Situasi saat ini cenderung kondusif, namun diyakini konflik tersebut belum mencapai puncaknya karena pihak Pemkab. Biak Numfor masih konsisten pada perencanaan relokasi. Krisis lebih parah dari yang terjadi sebelumnya pasti akan terjadi jika konflik tersebut tidak diselesaikan segera.*

**Kata Kunci:** *Pasar Tradisional, Konflik, Dinamika konflik, Relokasi pasar dan Perlawanan pedagang.*

### **PENDAHULUAN**

Pasar merupakan bagian penting yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Keberadaan pasar memastikan hasil produksi bisa dipasarkan ke konsumen, dan sebaliknya konsumen (masyarakat) dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Dalam skema tersebut, pedagang pasar menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen (masyarakat). Selain itu, pasar

juga menyediakan peluang atau ruang untuk berbagai profesi yang berkaitan dengan penyediaan jasa. Sehingga, kedudukan pasar sangatlah vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Tidak hanya soal ekonomi, pasar juga berfungsi sosial, yakni menjadi wadah bersosialisasi bagi masyarakat, ruang penyebaran informasi yang sangat cepat dan fungsi sosial lainnya. Laju modernisasi kemudian memunculkan pengklasifikasian pasar, yakni pasar tradisional dan pasar

modern. Perbedaannya, pasar tradisional berisikan banyak pedagang dan berfungsi sebagai wadah bagi para pedagang dan pembeli untuk saling berinteraksi dan bernegosiasi secara langsung dan terbuka. Sedangkan pasar modern berfungsi sebagai distributor tunggal atau bersifat monopoli.

Eksistensi pasar tradisional tidak pernah bisa tergantikan oleh pasar modern, bahkan di kota-kota besar sekalipun. Kelebihanannya adalah sistem sosial yang terbangun di pasar tradisional lebih dinamis, sehingga lebih menyenangkan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang secara kuantitas merupakan yang dominan di masyarakat Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, keumuman pasar tradisional terletak di sekitar ataupun di pusat perkampungan masyarakat. Endrawanti (2010), menjelaskan bahwa pasar tradisional merupakan: 1) Ruang untuk saling bertemu muka; 2) Tempat bagi masyarakat, terutama dari kalangan bawah, melakukan interaksi sosial dan tukar informasi atas segenap permasalahan yang dihadapi; 3) Kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Namun eksistensi pasar tradisional selalu dipandang kumuh, penyebab kemacetan, serta dianggap menghambat laju investasi. Pasar tradisional kemudian terus digusur, direlokasi, direvitalisasi, ditertibkan dan berbagai dalih lainnya yang pada esensinya adalah upaya pengusuran, yang kemudian berdampak luas terhadap masyarakat.

Hasil penelitian Laksono (2013), menyimpulkan bahwa menurunnya hasil penjualan dan keuntungan pedagang yang menerima relokasi menyebabkan sebagian pedagang menolak relokasi dan sebagian

lagi memilih lokasi lain untuk berjualan. Di Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, terdapat satu pasar yang merupakan pasar tradisional terbesar di daerah tersebut, yakni Pasar Inpres Biak. Pasar tersebut telah ada sejak dahulu kala dan menjadi pusat perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat. Pasar tersebut memiliki kedudukan penting dalam menopang kehidupan masyarakat. Pasar tersebut juga menjadi ruang bersosialisasi dan menjadi salah satu pusat informasi bagi masyarakat. Pemkab. Biak Numfor kemudian memprogramkan relokasi pasar tersebut, yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, khususnya para pedagang. Asumsi awal, terdapat kepentingan untuk proyek pembangunan pasar modern (mall) dibalik relokasi tersebut. Kepentingan tersebut secara langsung bertentangan dengan kepentingan para pelaku pasar dan masyarakat secara luas.

Ali Syari'ati dalam Susilo (2008), menyatakan bahwa konflik memiliki keberadaan (existence) dan ditemukan di manapun, kapanpun dan mewarnai hampir setiap lini kehidupan. Terjadinya konflik disebabkan banyak faktor, seperti persoalan ideologis, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan etnis dan faktor-faktor lainnya. Sehingga terjadinya konflik pada kasus tersebut menjadi sesuatu yang niscaya terjadi. Konflik yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Adapun tahapan dinamika konflik yang dikemukakan oleh Fischer dalam Susan (2010), terdiri dari prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik dan pasca konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisa dinamika konflik pada kasus relokasi Pasar Inpres di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian.

### ***Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Inpres Biak yang berlokasi di Distrik (Kecamatan) Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua, pada Bulan Oktober – Desember 2016. Untuk memperkuat temuan dilakukan pula penelitian di Pasar Darfuar yang menjadi lokasi tujuan relokasi, serta di beberapa titik pasar dadakan (kaget) di Distrik. Biak Kota.

### ***Informan***

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkonflik secara langsung, serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan konflik yang terjadi, yakni: 1) Pedagang pasar yang direlokasi; 2) Pedagang yang menolak direlokasi dan bertahan di Pasar Inpres Biak sampai saat ini; 3) Masyarakat di Sekitar Pasar Inpres Biak; 4) Pemerintah setempat; 5) Dinas atau lembaga yang bertugas mengelola pasar. Informan tersebut dianggap mengetahui secara mendalam tentang konflik, dan juga dianggap mampu memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan.

### ***Pengumpulan Data***

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan telaah dokumen. Dalam upaya mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam, peneliti juga menggunakan metode integrasi. Metode integrasi adalah upaya peneliti mengintegrasikan diri atau membangun hubungan yang erat dengan

informan. Hubungan erat yang dimaksud adalah hubungan terbatas antara peneliti dengan informan atau tidak meluas pada hubungan kerjasama pada hal yang lain. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan mendalam yang didapatkan ketika informan merasa aman dan nyaman (Hamid, 2015).

### ***Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial, yakni menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci (Bungin, 2005). Proses penarikan dan pengujian kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data-data yang disajikan dan diklasifikasi dengan diperhadapkan pada teori konflik hingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Profil Pasar Inpres Biak***

Pasar Inpres Biak terletak di pusat pemukiman masyarakat di Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua, yang pendiriannya didasarkan pada kebutuhan dan kehendak masyarakat. Pengembangannya kemudian disokong oleh pemerintah, meskipun peruntukkan awal lahan tersebut untuk tempat hiburan rakyat (THR). Letak pasar tersebut sangat strategis, sehingga masyarakat mudah mengaksesnya dan para pedagangpun mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kedudukannya sangat vital untuk perputaran ekonomi, namun pemerintah menganggap eksistensinya mengganggu estetika kota karena kondisinya yang padat, semrawut dan seringkali mengakibatkan kemacetan. Hal tersebut kemudian melahirkan pertentangan

antara kepentingan ekonomi rakyat dengan kepentingan estetika kota. Jika dicermati, jalan keluarnya adalah penataan agar masalah estetika tersebut bisa diselesaikan.

### ***Tujuan dan Proses Relokasi Pasar Inpres Biak***

Tujuan relokasi yang mengemuka adalah penataan kota dan perluasan wilayah ekonomi. Relokasi tersebut dianggap mampu meningkatkan estetika kota, serta memperluas zona ekonomi. Adapun tujuan sekunder, menurut pihak pemerintah, adalah pembangunan mall di lokasi tersebut.

Mengenai proses relokasi, ditemukan fakta bahwa tidak ada sosialisasi resmi tentang relokasi tersebut. Informasi valid mengenai relokasi baru didapatkan saat instruksi pindah dan membongkar tempat jualan diedarkan. Adapun mantan Kepala Pasar yang cenderung tidak sepatutnya dengan relokasi tersebut diberhentikan sepihak oleh Pemkab. Biak Numfor. Tidak terlihat usaha-usaha yang lebih demokratis dari Pemkab. Biak Numfor pada proses relokasi. Metode persuasif-dialogis tidak mengemuka, sebaliknya cara-cara represif-lah yang nampak. Pendapat masyarakat sepenuhnya terabaikan dari seluruh proses relokasi, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pelaksanaan eksekusi relokasi sepenuhnya menggunakan kekuatan (alat) pemaksa dalam wujud Satpol PP yang melakukan pembongkaran paksa dan pembakaran tempat jualan para pedagang. Metode demikian tentunya tidak manusiawi, apalagi objek yang dieksekusi merupakan sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat.

### ***Pihak-pihak yang Berkonflik***

Pihak-pihak yang berkonflik adalah: 1) Pihak utama, yakni pihak Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan pedagang pasar. Kedua pihak tersebut bertentangan

kepentingan dan berkonflik secara langsung dan terbuka; 2) Pihak sekunder, yakni masyarakat dan pelaku usaha bermodal besar. Masyarakat bergantung pada Pasar Inpres untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, sehingga menerima dampak relokasi secara langsung, namun belum terlibat konfrontasi secara terbuka. Sedangkan pelaku usaha bermodal besar menjadi pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari relokasi tersebut, yakni akomodasi untuk memperbesar dan memperluas usaha. Keterlibatannya pada kasus ini belum dilakukan secara terbuka.

### ***Attitudes/Feelings (Sikap)***

Sampai saat ini, kedua belah pihak konsisten pada sikap yang saling bertolakbelakang. Pihak pemerintah tetap menginginkan relokasi dan mendudukkan para pedagang sebagai pihak yang bersalah atas sikapnya menolak relokasi. Pemerintah mempersepsikan bahwa relokasi tersebut akan berdampak positif terhadap program pembangunan, sehingga tetap menginginkan agar pedagang menerima relokasi. Sedangkan para pedagang konsisten pada sikapnya menolak relokasi dengan alasan bahwa relokasi tersebut akan menghancurkan kerja produksi mereka. Bersama masyarakat, para pedagang berharap pemerintah mengubah kebijakan dan tidak melanjutkan program relokasi.

### ***Behavior (Perilaku/Tindakan)***

Pertentangan kepentingan yang tajam antara kedua belah pihak yang berkonflik pada kasus ini melahirkan tindakan koersif dan non-koersif. Pihak pemerintah memaksakan relokasi dengan melakukan pembongkaran paksa dan pembakaran tempat jualan pedagang yang menolak direlokasi. Namun pihak pedagang juga tetap resisten dan memaksakan untuk

tetap berjualan di Pasar Inpres meskipun terus mendapatkan intimidasi. Tindakan koersif lain yang dilakukan oleh pedagang adalah berdemonstrasi berkali-kali menolak relokasi.

Adapun tindakan non-koersif dari pihak pemerintah adalah terus memblejeti kondisi Pasar Inpres yang dianggap tidak layak lagi eksistensinya karena semrawut, kumuh, penyebab kemacetan dan lain-lain. Sedangkan pihak pedagang yang disokong masyarakat terus mengkampanyekan keunggulan strategis Pasar Inpres, serta kedudukannya yang vital. Pada perkembangannya, mulai dilakukan upaya dialogis antara kedua belah pihak. Hingga akhirnya Pasar Inpres kembali beroperasi namun kondisinya masih sangat jauh dari normal dibanding kondisi sebelumnya. Meski demikian, pihak pemerintah tetap menginginkan relokasi, dengan target jangka panjang pembangunan mall di lokasi tersebut. Sehingga relokasi akan kembali dipaksakan (koersif), bahkan menggunakan metode kekerasan, jika syarat pembangunannya terpenuhi.

### **Dinamika Konflik**

*Prakonflik*, adalah periode terjadinya ketidaksesuaian pandangan dan penilaian di antara pihak Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan masyarakat. Pihak pemerintah menilai eksistensi Pasar Inpres mengganggu estetika kota, sehingga perlu direlokasi. Pembangunan mall kemudian dianggap sebagai resolusi untuk meningkatkan estetika kota. Sedangkan, pihak pedagang menilai Pasar Inpres sebagai sumber kehidupan yang paling strategis. Sejalan dengan itu, masyarakat menilai Pasar Inpres sangat vital kedudukannya untuk akses kebutuhan sehari-hari. Pada prakteknya, pemerintah menetapkan perencanaan secara

sepihak. Sedangkan masyarakat menjadi objek yang harus tunduk pada setiap perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan ataupun tanpa melibatkannya. Situasi tersebut menjadi awal dari konflik yang tidak terselesaikan hingga saat ini.

*Konfrontasi*, dilakukan oleh para pedagang sebagai bentuk penolakan terhadap program relokasi melalui aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi dilakukan beberapa kali dengan segenap kemampuan agar pendapat mereka bisa didengarkan dan keinginan mereka terpenuhi. Tidak hanya membawa diri, barang daganganpun dimobilisasi saat berdemonstrasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pedagang kemudian tidak mendapatkan respon positif, pendapatnya terabaikan, hingga konflik pun tidak terselesaikan hingga kini.

*Krisis atau puncak konflik*, adalah periode yang ditandai dengan terjadinya aksi-aksi kekerasan (intens dan massal) dan peristiwa lain, yang ditandai dengan jatuhnya korban, serta kerugian materil. Krisis yang pertama (Krisis I) terjadi pada tahun 2011 – 2012, yang ditandai dengan tindakan represif dari pemerintah dalam menghadapi penolakan para pedagang. Pemerintah, dengan menggunakan kekuatan Satpol PP, melakukan pembongkaran paksa dan pembangkararan tempat jualan para pedagang. Tindakan tersebut mendapatkan perlawanan dari para pedagang yang diselingi dengan aksi-aksi protes (demonstrasi). Namun sebagian pedagang tidak mampu bertahan menghadapi tindakan represif tersebut, hingga sebagiannya memutuskan pindah ke Pasar Darfuar dan sebagiannya lagi pindah ke beberapa titik yang kemudian menjadi pasar dadakan (kaget).

Sementara itu, sebagian pedagang tetap bertahan sampai akhirnya terjadi peristiwa kebakaran pada tahun 2015 yang melululntakkan seluruh bagian Pasar Inpres. Peristiwa tersebut menandai krisis yang kedua (Krisis II). Kebakaran tersebut secara total mengancurkan basis produksi para pedagang. Kondisi yang kemudian mengharuskan mereka untuk meninggalkan Pasar Inpres dan mulai membangun kembali basis produksi di tempat lain. Sejak saat itu pasar kaget (dadakan) menjamur di Distrik Biak Kota. Sebagian besar pedagang tetap menolak pindah ke Pasar Darfuar karena lokasinya yang tidak strategis untuk berjualan. Meskipun saat ini Pasar Inpres kembali dibuka, namun sebagian pedagang tidak serta merta menutup tempat jualannya di tempat lain. Mereka menyadari bahwa kondisi tersebut belum menjadi solusi akhir, sangat memungkinkan relokasi kembali dipaksakan di kemudian hari untuk kepentingan tertentu. Jika itu terjadi, mereka telah memiliki tempat alternatif.

Jika melihat posisi konflik saat ini, kebijakan pemerintah membuka kembali Pasar Inpres bukanlah bentuk perubahan perencanaan. Akan tetapi belum terpenuhinya syarat-syarat untuk membangun mall di lokasi tersebut. Sehingga posisi para pedagang masih terancam karena relokasi sangat memungkinkan dipaksakan kembali. Melihat posisi kasusnya, konflik tersebut belum mencapai puncaknya. Kondisi yang diperparah dengan menjamurnya pasar kaget, yang justru semakin memperburuk estetika kota. Situasi tersebut menjadi dasar untuk meyakini bahwa krisis yang lebih parah dari Krisis I dan II sangat dimungkinkan terjadi di kemudian hari.

## Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi Pasar Inpres Biak telah melahirkan konflik struktural sebagai konsekuensi dari pertentangan kepentingan antara Pemkab. Biak Numfor dengan masyarakat Distrik Biak Kota, terkhusus para pedagang pasar. Konflik tersebut sejauh ini belum mencapai puncaknya meskipun telah melahirkan periode Krisis I dan Krisis II yang menyebabkan hancurnya basis produksi para pedagang. Meskipun eskalasi konflik cenderung menurun dalam setahun terakhir pasca dibukanya kembali Pasar Inpres, namun krisis yang lebih parah dari Krisis I dan Krisis II dipastikan akan terjadi jika konflik tersebut tidak diselesaikan segera. Sikap pemerintah yang masih konsisten pada perencanaan relokasi akan menyebabkan terjadinya konfrontasi sampai pada krisis yang lebih besar di masa yang akan datang. Sementara masyarakat, khususnya para pedagang, pun akan semakin resisten jika relokasi tersebut dipaksakan. Mengingat dampak relokasi telah nyata terjadi, baik dampak sosial ekonomi maupun dampak sosial budaya.

Dalam proses relokasi, pihak pemerintah tidak melakukan upaya yang bersifat persuasif-dialogis sebagaimana dengan yang seharusnya dilakukan dalam setiap perencanaan pembangunan. Proses yang dilakukan justru mengedepankan cara-cara represif, dengan praktek minimumnya instruksi pindah melalui surat edaran. Dalam hal ini para pelaku pasar tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan mengenai jalan keluar atas masalah-masalah yang ada di Pasar Inpres. Hingga akhirnya relokasi menjadi keputusan sepihak dari pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sepenuhnya didudukkan sebagai subordinat, sementara pihak pemerintah

menjadi superordinat. George Simmel dalam Susilo (2008), menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat otoritas yang berbeda-beda yang menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Teori konflik juga melihat bahwa masyarakat disatukan dengan “paksaan” atau keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi) (Wikipedia, 2016).

Relokasi tersebut kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat. Para pedagang, khususnya yang menerima direlokasi ke Pasar Darfuar, mengalami stagnasi ekonomi. Damsar (2002), menjelaskan bahwa pasar merupakan salah satu yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Pasar Darfuar yang menjadi tujuan relokasi pedagang Pasar Inpres kemudian tidak mampu menjadi wadah bagi pembeli dan pedagang beraktifitas normal. Persoalan mendasarnya adalah letaknya yang tidak strategis karena jauh dari pemukiman-pemukiman masyarakat atau tidak aksesibel bagi masyarakat. Fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mokoginta dkk (2012), yang menyimpulkan bahwa relokasi pedagang pasar lama ke pasar baru di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Manado, mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Faktor yang menyebabkannya adalah: a) Jarak tempat tinggal yang jauh (aksesibilitas) dan tidak strategis, baik bagi pedagang maupun pembeli; b) Kenyamanan dalam berdagang;

dan, c) Status kepemilikan tempat berdagang.

Pemetaan konflik pada kasus relokasi Pasar Inpres menunjukkan bahwa pihak masyarakat (pedagang pasar) berhadapan langsung dengan Pihak Pemerintah Kab. Biak Numfor yang menjadi perencana dan pelaksana program relokasi. Pihak pemerintah kemudian mengontrol sepenuhnya seluruh tahapan konflik, mulai dari prakonflik, konfrontasi, hingga terjadinya periode krisis I dan II. Situasi tersebut sejalan dengan pendapat Dahrendorf, yang menyatakan bahwa hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran klas. Klas yang dimaksud adalah klas yang berkuasa dan dikuasai. Posisi sekelompok orang dalam struktur sosial menentukan otoritas terhadap kelompok lainnya. Kekuasaan memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai (Dahrendorf dalam Susan, 2010).

Meski demikian, bukan berarti bahwa masyarakat, khususnya para pedagang, tidak melakukan perlawanan. Berbagai tindakan konfrontasi terus dilakukan meskipun menghadapi kekuatan pemerintah yang jauh lebih besar. Perlawanan tersebut didorong oleh kepentingan untuk mengakses sumber-sumber kehidupan. Telah menjadi tesis umum bahwa ketika masalah tersebut menyangkut akses terhadap sumber-sumber kehidupan, maka tindakan konfrontasi niscaya akan terus dilakukan oleh masyarakat. Sebagai bukti, pada kasus relokasi Pasar Inpres, masyarakat (pedagang) masih terus melakukan tindakan konfrontasi meskipun terus menghadapi tekanan.

Berdasar pada uraian di atas, konflik yang terjadi adalah konflik yang bersifat asimetris. Dalam hal ini, Pemerintah Kab. Biak Numfor menjadi pihak yang kuat, sedangkan masyarakat (pedagang) menjadi pihak yang lemah. Menurut Galtung dalam Hamid (2015), penyelesaian konflik yang bersifat tidak simetris hanya akan terjadi jika hadir pihak ketiga untuk menciptakan keberimbangan kekuatan. Pihak ketiga mesti menggabungkan kekuatan dengan pihak yang lemah, untuk mengubah situasi. Dari situasi dimana salah satu pihak berada dalam tekanan dan pihak yang lain terus menekan, menjadi situasi berimbang dimana kedua belah pihak saling memperhitungkan. Ketika situasi itu terjadi maka dimungkinkan terbuka ruang negosiasi yang berimbang.

Selain pembahasan di atas, hal pokok yang perlu diperhatikan pada kasus ini adalah hal-hal yang menjadi akar (sumber) konflik. Alasan kuat dari pihak pemerintah untuk melakukan relokasi adalah kondisi Pasar Inpres yang sudah tidak layak karena semrawut (kumuh), hingga dianggap mengganggu estetika kota. Alasan lain adalah perlu dilakukan persebaran zona ekonomi karena perputaran ekonomi terlalu terpusat. Pandangan tersebut patut untuk diperdebatkan, mengingat relokasi yang dilakukan sungguh tidak wajar. Relokasi tersebut adalah relokasi lintas kecamatan (distrik), yakni dari Pasar Inpres yang berlokasi di Distrik Biak Kota ke Pasar Darfuar yang berlokasi di Distrik Samofa. Hal lain, Pasar Inpres adalah satu-satunya pasar tradisional di Distrik Biak Kota. Bagaimana mungkin di satu kecamatan (distrik) tidak terdapat satupun pasar tradisional. Sementara di Indonesia, masyarakat dan pasar tradisional tidak terpisahkan. Pada akhirnya, saat relokasi tersebut tetap dilakukan justru berakibat

pada menjamurnya pasar kaget untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasar tradisional. Kondisi tersebut justru menjadikan kesemrawutan meluas ke berbagai titik di Distrik Biak Kota.

Masalah yang kedua adalah terpusatnya zona ekonomi di Pasar Inpres. Penting untuk diperhatikan bahwa Distrik Biak Kota merupakan pusat pemukiman terbesar di Kab. Biak Numfor. Bagaimana mungkin persebaran ekonomi akan terjadi dengan merelokasi pedagang, sementara pemukiman terbesar masyarakat terpusat di Distrik Biak Kota. Relokasi tersebut justru akan mematikan perekonomian para pedagang dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan sehari-harinya. Sehingga wajar ketika mayoritas pedagang yang direlokasi bertahan di wilayah Distrik Biak Kota dengan membangun tempat-tempat jualan yang baru (pasar kaget).

Adapun perencanaan Pemkab. Biak Numfor pasca relokasi adalah pembangunan mall di lokasi tersebut. Berdasar pada uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perencanaan yang didudukkan pada posisi sekunder tersebut adalah akar (sumber) masalah yang sesungguhnya. Perluasan ekonomi yang dimaksud adalah menyingkirkan para pedagang kecil ke Pasar Darfuar yang jauh dari masyarakat dan memberikan ruang bagi pelaku ekonomi bermodal besar untuk memonopoli perdagangan di pusat pemukiman masyarakat. Ketika para pedagang direlokasi, maka pembangunan mall di lokasi Pasar Inpres akan berjalan mulus.

Pembangunan mall (pasar modern) adalah bentuk akomodasi terhadap kepentingan para pelaku usaha bermodal besar. Sehingga, pemerintah pada kasus ini menunjukkan keberpihakannya pada pelaku usaha bermodal besar. Dalam hal ini, pelaku

usaha bermodal besar berada di balik relokasi tersebut. Analisis tersebut sejalan dengan teori konflik Karl Marx, yang menegaskan bahwa dalam masyarakat terdapat sebuah pertentangan yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Institusi-institusi sosial didirikan oleh kelas berkuasa atau kelas dominan yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan serta sebagai alat penindasan. Setiap kelas memiliki kepentingan sendiri yang saling bertentangan dan mengakibatkan konflik terjadi. Kepemilikan dan kontrol sarana-sarana produksi dikuasai oleh individu atau kelompok yang dominan (Kristeva, 2011). Sejalan pula dengan pendapat Prabowo dkk (2013), yang menyatakan bahwa otoritas atau kewenangan pemerintah kemudian menjadi komoditas yang bernilai bisnis di semua level pelayanan publik.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik pada kasus relokasi Pasar Inpres Biak hanya akan terselesaikan jika Pemerintah Kab. Biak Numfor mempraktekkan keberpihakan pada pedagang pasar. Keberpihakan yang wajar mengingat para pedagang Pasar Inpres Biak adalah masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke bawah, yang sejatinya wajib dilindungi oleh pemerintah. Tidak hanya untuk kepentingan para pedagang, namun kepentingan masyarakat yang mengakses kebutuhan sehari-hari di Pasar Inpres Biak wajib pula dilindungi dan diperjuangkan oleh pemerintah. Adapun mengenai kondisi Pasar Inpres Biak yang semrawut, kumuh dan penyebab kemacetan, penyelesaiannya adalah penataan, bukan relokasi. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk merelokasi Pasar Inpres Biak. Selanjutnya, disarankan kepada

Kepada pihak Pemerintah Kab. Biak Numfor agar meninjau kembali program relokasi Pasar Inpres Biak dan rencana pembangunan mall (pasar modern) di lokasi tersebut, serta lebih akomodatif terhadap berbagai pendapat yang berkembang mengenai relokasi Pasar Inpres Biak, serta mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi dalam menghadapi tuntutan pedagang dan masyarakat. Disarankan pula kepada berbagai pihak agar mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Damsar. (2002). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endrawanti S. (2010). Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus Di Pasar Sampangan Kota Semarang. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6:123-127.
- Hamid I. (2015). Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya (Konflik PTPN XIV Dengan Masyarakat Polongbangkeng-Takalar dan Keera-Wajo). *Jurnal Pascasarjana – Universitas Hasanuddin*, 4(2):141-148.
- Kristeva N. S. (2011). *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laksono R. (2013). Analisis Relokasi Pasar Ngarsopuro Di Kota Surakarta. *Jurusan Ekonomi Pembangunan – Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 85.

Mokoginta S. R. dkk. (2012). Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara. Perencanaan Wilayah dan Kota – Universitas Sam Ratulangi Manado, 103.

Prabowo A. dkk. (2013). *Dunia Dalam Kota*. Makassar. Makassar: Penerbit Innawa.

Susan N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Susilo D. R. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern; Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

Wikipedia. (2016). Teori Konflik. Diakses 29 Agustus 2016. Available from: ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/teori\\_konflik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_konflik)).